

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah salah satu sarana pembantu peneliti dalam acuan penelitian sehingga peneliti dapat memperkaya teori yang digunakan untuk mengkaji penelitian yang dilakukan. Peneliti telah merangkum beberapa penelitian terdahulu terkait topik yang akan digunakan untuk referensi penelitian. Peneliti menemukan beberapa penelitian dengan topik yang sama dengan yang dilakukan oleh peneliti. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi oleh peneliti pada rincian berikut ini :

Penelitian yang dilakukan oleh Rosita Desiati (2013) berjudul Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Program Desa Wisata. Penelitian ini bertujuan Mendeskripsikan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan program Desa Wisata oleh Pokdarwis Kreet Binangun dan Mendeskripsikan faktor pendukung dalam pemberdayaan masyarakat melalui program Desa Wisata oleh Pokdarwis Kreet Binangun. Penelitian ini menggunakan analisis deksriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu Pemberdayaan masyarakat oleh Pokdarwis Kreet Binangun diterapkan dengan menyelenggarakan kegiatan sosialisasi atau penyuluhan, diskusi, kompetisi, percontohan dan perintisan. Pengelolaan yang dilakukan yaitu meliputi: (a) Perencanaan, (b) Pengorganisasian, (c) Penggerakan, (d) Evaluasi. Hasil yang kedua Permasalahan yang dihadapi oleh Pokdarwis Kreet Binangun adalah kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang desa pariwisata, belum optimalnya kerja masing-masing bidang khususnya bidang pariwisata, kurangnya perhatian pemerintah, sarana dan prasarana pendukung pariwisata yang memadai, serta destinasi obyek

wisata yang belum tertata dengan baik. Faktor pendukung yang ada meliputi beragamnya potensi wisata yang tersedia, adanya dukungan dari pengurus dan tokoh masyarakat setempat, kerjasama antar warga masyarakat serta sikap kekeluargaan dan gotong royong yang masih sangat kental.

Penelitian yang dilakukan oleh Widiatmi, Sudrajat dan Sodian, (2014) dengan judul Analisis Kelayakan Finansial Agrowisata Kebun Buah (Studi Kasus di Agrowisata Kebun Buah Mangunan, Bantul, Yogyakarta). Tujuan dari penelitian ini yaitu Menentukan manfaat kebun buah Mangunan dan Menentukan kelayakan financial yang didasarkan pada criteria investasi, dan untuk menentukan periode waktu pengembalian investasi agrowisata kebun buah mangunan berdasarkan biaya yang dikeluarkan dan manfaat. Penelitian ini menggunakan Analisa deskriptif kualitatif, Analisis NPV, Analisis IRR, Analisis BCR, Analisis Masa Pengembalian Investasi. Hasil dari penelitian ini Pemandangan alam yang indah dari atas bukit menjadi daya tarik terbesar pengunjung, sehingga pengelolaan sarana dan prasarana serta lingkungan bukit perlu ditingkatkan dan dilestarikan dengan menggali potensi area bukit, membuat objek atau arena wisata baru yang menyenangkan sehingga pengunjung ingin datang kembali. Hasil analisis financial menunjukkan, Agrowisata Kebun Buah Mangunan di Kabupaten Bantul, layak dijalankan berdasarkan nilai-nilai sebagai berikut : *Net Present Value* (NPV) sebesar Rp. 50.707.576.366,- lebih besar dari 0, berarti Agrowisata ini dinyatakan layak karena mendapatkan keuntungan. Nilai *Internal Rate of Return* (IRR) yang didapatkan adalah 18,92%, melebihi tingkat suku bunga atau *discount factor*, maka usaha ini layak dijalankan karena tingkat bunga maksimal yang dapat dibayar oleh proyek untuk sumber dana lebih besar

dari tingkat diskonto. *Benefit cost ratio* (BCR) diperoleh nilai sebesar 3,68 lebih besar dari 1 artinya setiap pengeluaran Rp. 1 akan memberikan manfaat sebesar Rp. 3,68. Sedangkan pengembalian biaya investasi yang diukur dengan metode payback period menunjukkan hasil bahwa biaya investasi akan tercapai pada tahun ke 14 dari umur proyek

Penelitian yang dilakukan oleh I Ketut Suarhana, Nyoman Madiun, Moeljadi, dan Sherlinda Octa Yuniarsa (2015) dengan judul *Exploring The Community Participation, Tourism Village, And Social-Economic To Environment Impact (Case Study: Pentingsari Village, Yogyakarta)*. Tujuan dari penelitian ini yaitu Mengembangkan partisipasi masyarakat di daerah baru-baru ini di desa wisata yang efektif yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sosial budaya dan lingkungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengadopsi paradigma interpretif. Hasil dari penelitian ini Pemberdayaan masyarakat pedesaan di desa Pentingsari dapat memaksimalkan pemanfaatan potensi alam dan lingkungan, serta memberdayakan masyarakat dengan memaksimalkan pemanfaatan sosial budaya, adat istiadat dan warisan sejarah masyarakat pedesaan dengan memaksimalkan potensi pertanian dan perkebunan . Secara keseluruhan, pemerintah dapat meningkatkan ekonomi lokal, terutama mendorong munculnya pengusaha baru di daerah ini, pengusaha akan meningkatkan daya saing bisnis di desa ini dengan peningkatan semangat kewirausahaan oleh dampak sosial-ekonomi dan lingkungan.

Penelitian yang dilakukan oleh Subekti, Soejono dan Muhlis dengan judul Analisis Pendapatan Usahatani Mangga Gadung di Desa Bayeman Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo. Tujuan dari penelitian ini adalah Pendapatan

usahatani mangga gadung di Desa Bayeman Kecamatan Arjasa Kanupaten Situbondo. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Pendapatan dan Analisis Regresi Berganda. Hasil dari penelitian ini Usahatani mangga gadung di desa Bayeman Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo adalah menguntungkan dengan rata-rata pendapatan sebesar Rp. 18.435.656,95/ha/tahun.

Penelitian yang dilakukan oleh Aditya Suyatno dan Utami Dewi (2017) dengan judul Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengembangan Desa Wisata Minapadi di Kecamatan Seyegan. Tujuan dari penelitian ini adalah Menjelaskan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan Desa Wisata Minapadi Cibuk Kidul di Kecamatan Seyegan. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan Desa Wisata Minapadi Cibuk Kidul di Kecamatan Seyegan dilihat dari tiga tahap pemberdayaan, meliputi:(1) Tahap penyadaran, melalui sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman. (2) Tahap pengkapasitasan, memberikan kemampuan kepada masyarakat melalui tiga cara, yaitu: (a) Pengkapasitasan individu, (b) pengkapasitasan kelompok, dan (c) pengkapasitasan sistem nilai, (3) Tahap pendayaan, adanya inovasi kuliner khas, penyewaan homestay, kerajinan barang bekas, budidaya tanaman herbal, peningkatan ekonomi masyarakat melalui hasil budidaya minapadi, dan kegiatan pemberdayaan lainnya diatas.

Penelitian yang dilakukan oleh Martiawan Santoso (2018) dengan judul Strategi Pemberdayaan Masyarakat Karangtaruna Dalam Rangka Mengembangkan Pariwisata Masyarakat Tubing “Keceh Ndesa” Di Desa Kuryi, Wonorejo, Jatiyoso, Karanganyar. Tujuan dari penelitian ini adalah Mengetahui

program pemberdayaan masyarakat Desa Kuryo, Wonorejo, Jatiyoso dalam mengembangkan objek wisata Tubing Keceh Ndesa. Analisis penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Program pemberdayaan yang dilakukan oleh masyarakat di objek wisata Tubing Keceh Ndesa sebagai berikut, 1) Melibatkan masyarakat dalam penataan lokasi melalui kerja bakti atau gotong royong, 2) Pemandu susur sungai, 3) Pemeliharaan objek wisata Tubing Keeceh Ndesa di desa Kuryo 4) Melakukan rapat evaluasi tiap bulan dengan tujuan untuk mengembangkan dan memajukan objek wisata Tubing Keceh Ndesa.

Penelitian yang dilakukan oleh Adhitya Farhan (2018) dengan judul Analisis Pemberdayaan Masyarakat Desa Wisata Candirejo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang. Tujuan penelitian ini yaitu Mengidentifikasi bentuk pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Candirejo melalui pengembangan potensi wisata yang ada di Desa Candirejo. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini Bentuk pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Candirejo melalui pengembangan potensi wisata yaitu adanya homestay, local guide, penyewaan sepeda gunung, agrowisata dan agrotani, kesenian tradisional dan Koperasi “Desa Candirejo” sebagai mitra pemasaran paket wisata. Faktor pendukung Desa Candirejo adalah potensinya yang masih memadai, dekat dengan pemerintahan, adanya fasilitas dari dinas terkait dan partisipasi masyarakatnya yang tergolong aktif. Sedangkan faktor penghambat yang ditemui dalam pemberdayaan masyarakatnya adalah masih terbatasnya dana, terbatasnya SDM, dan lemahnya bahasa dalam berkomunikasi

Penelitian yang dilakukan oleh Dinis Cahyaningrum (2017) dengan judul *Community Empowerment Based Local Wisdom In Tourism Of Bajo Community, Wakatobi*. Tujuan dari penelitian ini yaitu Mengetahui lebih lanjut tentang pemberdayaan Komunitas berbasis Kearifan lokal di Desa Bajo, Wakatobi untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat Bajo di bidang pariwisata. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu Tradisi lokal Bajo telah ada selama beberapa generasi diperkuat sehingga dapat berfungsi sebagai daya tarik wisata bernilai ekonomi tinggi dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat Bajo yang sebagian besar mata pencaharian sebagai nelayan tradisional. Kearifan lokal yang dimiliki oleh orang Bajo dapat menjadi aset sosial untuk memberdayakan warganya untuk berbaur dalam kegiatan pariwisata. Oleh karena itu sumber daya alam, budaya, industri, kearifan lokal, dan sumber daya lokal yang dimiliki oleh masyarakat setempat yang dapat digunakan sebagai objek dan daya tarik wisata dilestarikan. Masyarakat Bajo juga mendapat manfaat ekonomi yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan wisata. Penelitian yang dilakukan oleh Aris Purniasih (2009) dengan judul *Dampak Sosial Ekonomi Pengembangan Objek Wisata Pantai Bocor Terhadap Masyarakat Desa Setrojenar Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen*. Tujuan dari penelitian ini adalah Mengetahui perubahan sosial yang terjadi di masyarakat sebagai akibat dari menanggapi wisatawan yang datang. Analisis yang digunakan adalah Analisis Deskriptif Kualitatif dalam bentuk tabel frekuensi. Hasil dari penelitian ini Dampak Sosial : Adanya sikap penduduk yang meniru cara berpakaian wisatawan, sikap pergaulan serta bertambahnya wawasan atau

pengetahuan. Dampak Ekonomi : Terdapat sumbangan signifikan terhadap pendapatan total rumah tangga tidak mengalami perubahan yang berarti bagi masyarakat.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah kebanyakan penelitian terdahulu dilakukan di kawasan yang memang kawasan wisata seperti daerah Yogyakarta, Bali dan Lombok sedangkan masih sedikit penelitian yang dilakukan di desa wisata yang bukan kawasan wisata seperti Kabupaten Kediri, ditempat penelitian belum pernah dilakukan penelitian dengan tema pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan desa wisata. Perbedaan yang lainnya dalam hal kajian, subjek penelitian, dan analisis datanya. Sebagian besar para peneliti menggunakan analisis data deskriptif kualitatif. Sedangkan untuk analisis deskriptif kuantitatif sebagian peneliti menggunakan analisis pendapatan, dan uji t-test. Sedangkan persamaan penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan adalah analisis deskriptif kualitatif. Persamaan yang lain tujuan dari penelitian terdahulu yaitu mendeskripsikan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan program desa wisata dan tujuan dari penelitian ini merupakan gabungan dari beberapa tujuan yang ada pada penelitian terdahulu.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan berasal dari kata dasar daya yang berarti tenaga, upaya, kemampuan melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak. Selain itu pemberdayaan juga berasal dari bahasa ingris “*empower*” yang menurut Merriam Webster dan Oxford English Dictionary mengandung dua pengertian. Yang pertama adalah *to give power or authority to/* member kekuasaan, mengalihkan kekuatan, atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain, sedangkan pengertian yang

kedua yaitu *to give ability to or enable*/ upaya untuk memberi kemampuan atau keberdayaan (Ambar Teguh S, 2004).

Menurut Chatarina Rusmiyati, (2011) pemberdayaan adalah suatu cara rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai kehidupannya, atau pemberdayaan dianggap sebuah proses menjadikan orang cukup kuat untuk berpartisipasi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga yang mempengaruhi kehidupannya.

Pemberdayaan adalah proses menyeluruh, suatu proses aktif antara motivator, fasilitator, dan kelompok masyarakat yang perlu diberdayakan melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, pemberian berbagai kemudahan, serta peluang untuk mencapai akses sistem sumber daya kesejahteraan masyarakat. Menurut Sri Kuntari (2009) proses pemberdayaan meliputi *enabling*/ menciptakan suasana kondusif, *empowering*/ penguatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat, *supporting*/ bimbingan dan dukungan, *foresting*/ memelihara kondisi yang kondusif dan seimbang.

Berdasarkan beberapa pengertian pemberdayaan di atas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan konsep yang mengarah pada usaha menumbuhkembangkan akal pikiran masyarakat dengan melaksanakan suatu pembaharuan yang bertujuan untuk membentuk suatu individu yang berdaya. Maka konsep pemberdayaan pada dasarnya adalah upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi semakin efektif secara struktural, baik di dalam kehidupan keluarga, masyarakat, negara, regional, internasional maupun dalam bidang politik, ekonomi, dan lain-lain. Pemberdayaan berhubungan dengan upaya meningkatkan kemampuan dan memandirikan

sehingga masyarakat dapat mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki dalam rangka memegang control/ kendali atas diri dan lingkungannya.

Menurut Koentjaraningrat (2009) masyarakat dalam istilah bahasa Inggris adalah *society* yang berasal dari kata latin *socius* yang berarti kawan. Istilah masyarakat berasal dari bahasa Arab *syaraka* yang berarti ikut serta dan berpartisipasi, masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul, dalam istilah ilmiah adalah saling berinteraksi. Definisi lain masyarakat menurut Koentjaraningrat (2009) adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Koentjaraningrat (2009) mengungkapkan ciri kontinuitas merupakan kesatuan masyarakat yaitu; 1) interaksi antar warganya, 2) adat istiadat, 3) kontinuitas waktu, 4) Rasa identitas kuat yang mengikat semua warga.

Semua warga masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama dapat diartikan sama dengan hidup dalam suatu tatanan pergaulan dan keadaan ini tercipta apabila manusia melakukan hubungan. Soerjono, Soekanto, (2006) memaparkan bahwa masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan, tata cara, dari wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok, penggolongan, dan pengawasan tingkah laku serta kebiasaan-kebiasaan manusia. Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama untuk jangka waktu yang cukup lama sehingga menghasilkan suatu adat istiadat.

Menurut Soerjono, Soekanto (2006) masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama, sehingga

mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas.

Berdasarkan beberapa pengertian masyarakat diatas dapat penulis simpulkan bahwa masyarakat adalah sekumpulan manusia yang berinteraksi dalam suatu hubungan sosial. Mereka mempunyai kesamaan tradisi, sikap, wilayah, budaya, identitas dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan.

Menurut Sunit Agus T (2008) konsep pemberdayaan berkaitan dengan dua istilah yang saling bertentangan, yaitu konsep berdaya dan tidak berdaya terutama bila dikaitkan dengan kemampuan mengakses dan menguasai potensi dan sumber kesejahteraan sosial. Pemberdayaan masyarakat sebenarnya mengacu pada kata *empowerment*, yaitu sebagai upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses atau cara untuk meningkatkan taraf hidup dan kualitas masyarakat melalui suatu kegiatan tertentu, yaitu melakukan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang disesuaikan dengan keadaan dan karakteristik di masyarakat itu sendiri.

Konsep pemberdayaan masyarakat juga disampaikan oleh Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007) yakni mencakup pengertian *community development* (pembangunan masyarakat), *community-based development* (pembangunan yang bertumpu pada masyarakat), dan *community driven development* yang diterjemahkan sebagai pembangunan yang diarahkan berbasis masyarakat. Selain itu, Dinar (2018) berpendapat bahwa pemberdayaan tidak hanya ditujukan kepada masyarakat yang tidak memiliki daya, tetapi dapat diberikan juga kepada

masyarakat yang memiliki daya, namun masih terbatas untuk mencapai kemandirian.

Terdapat perbedaan upaya pemberdayaan yang dilakukan pihak internal dan eksternal (Septiyati, 2008). Pada lingkup internal terdapat potensi untuk terus terjadinya pemberdayaan, dilihat dari kemampuan masyarakat dalam pengembangan kelembagaan, identifikasi kebutuhan dan permasalahan komunitas serta berkerja sama untuk mencapai sasaran. Sedangkan pada lingkup eksternal, upaya keberlanjutan muncul karena adanya stimulus modal dan pendampingan. Meskipun demikian, keberadaan pihak eksternal tidak mutlak. Walaupun pihak eksternal telah menyelesaikan kegiatannya, namun masyarakat dapat melanjutkannya secara mandiri.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan berasal dari kata empower yang berarti memberdayakan. Pemberdayaan yaitu proses/cara/perbuatan memberdayakan sumber daya manusia yang ada. Dari proses tersebut seseorang / kelompok akan memiliki kemandirian, tahan uji, pintar, jujur, berkemampuan kreatif, produktif, emansipatif, tidak tergantung, pro-aktif, dinamis, terbuka dan bertanggung jawab dalam mengatasi semua masalah dan menjawab tantangan untuk mencapai kemajuan.

Prinsip pemberdayaan menurut perspektif pekerjaan sosial yang dikemukakan oleh Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007) yaitu :

1. Pemberdayaan adalah proses kerja sama antara klien dan pelaksana kerja secara bersama-sama yang bersifat mutual *benefit*.

2. Proses pemberdayaan memandang sistem klien sebagai komponen dan kemampuan yang memberikan jalan ke sumber penghasilan dan memberikan kesempatan.
3. Klien harus merasa dirinya sebagai agen bebas yang dapat mempengaruhi.
4. Kompetensi diperoleh atau diperbaiki melalui pengalaman hidup, pengalaman khusus yang kuat daripada keadaan yang menyatakan apa yang dilakukan.
5. Pemberdayaan meliputi jalan ke sumber-sumber penghasilan dan kapasitas untuk menggunakan sumber-sumber pendapatan tersebut dengan cara efektif.
6. Proses pemberdayaan adalah masalahh yang dinamis, sinergis, pernah berubah, dan evolusioner yang selalu memiliki banyak solusi.
7. Pemberdayaan adalah pencapaian melalui struktur-struktur paralel dari perseorangan dan perkembangan masyarakat.

Mengenai pemberdayaan masyarakat, kelompok adalah kumpulan dua orang atau lebih yang bekerja sama satu dengan yang lainnya secara teratur untuk mencapai satu atau lebih tujuan bersama. Menurut Rakhmat (2013), Pemberdayaan kelompok merupakan salah satu pendekatan yang menonjol dalam konteks perubahan sosial. Salah satu kegiatan strategi dalam pendekatan ini adalah pengorganisasian masyarakat atau kelompok. Satu-satunya faktor yang akan memastikan bahwa pembangunan kelompok berjalan dalam jalur yang benar adalah kehendak dan kemampuan kelompok itu sendiri untuk memperbaiki keadaan. Selanjutnya, dikatakan bahwa dalam konteks memberdayakan atau memperkuat kelompok agar mampu mandiri maka harus berangkat dari beberapa

asumsi, yaitu bahwa kelompok punya kepentingan terhadap perubahan, perubahan tidak pernah datang sendiri melainkan membutuhkan perjuangan, dan setiap usaha perubahan pada dasarnya membutuhkan daya tekanan tertentu, dimana usaha memperkuat daya tekan juga memerlukan perjuangan di dalamnya. Pada kelompok yang sebenarnya, anggota bergantung satu sama lain untuk mengejar tujuan itu untuk suatu periode waktu. Interaksi sosial yang ada dalam sebuah kelompok lebih mudah karena mereka mempunyai kebutuhan yang sama dan hubungan antara satu individu dengan yang lainnya membuat mereka saling tergantung.

Rakhmat (2013), mengemukakan pemberdayaan merupakan sebuah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia dan masyarakat yang kondisi sekarang belum mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Lebih lanjut perlu ditelusuri apa yang sesungguhnya dimaknai sebagai suatu masyarakat yang mandiri. Kemandirian masyarakat adalah merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, afektif dengan pengerahan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut. Pada dasarnya tujuan pemberdayaan adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan manusia yang otentik dan integral dari masyarakat yang lemah, miskin, marjinal, kaum kecil seperti petani, masyarakat miskin, dan kelompok wanita yang diskriminasi atau disampingkan.
2. Memberdayakan kelompok masyarakat tersebut melalui sosial ekonomi sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, namun sanggup berperan serta dalam pembangunan masyarakat.

Pemberdayaan dilakukan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan sosial di masyarakat, menghilangkan adanya kesenjangan sosial sehingga tercipta adanya suatu perkembangan yang maju dan mandiri dalam kehidupan bermasyarakat.

Sasaran pemberdayaan dalam mencapai kemandirian melakukan usaha yakni sebagai berikut :

1. Terbukanya kesadaran dan tumbuh peran aktif, mampu mengorganisir diri dan kemandirian bersama.
2. Memperbaiki keadaan sosial kehidupan masyarakat dengan meningkatkan pemahaman, peningkatan pendapatan dan usaha.
3. Meningkatkan kemampuan kinerja kelompok-kelompok swadaya maupun perorangan dalam ketrampilan teknis dan manajemen untuk memperbaiki produktifitas dan pendapatan mereka.

2.2.2 Tahap-tahap Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan adalah sebuah “proses menjadi” bukan sebuah “proses instan” Sebagai proses, menurut Wrihatnolo & Dwidjowijoto (2007)

pemberdayaan mempunyai tiga tahapan yaitu penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan.

Adapun penjelasannya sebagai berikut :

1. Tahap Pertama adalah Tahap Penyadaran

Pada tahap ini target yang hendak diberdayakan diberi “pencerahan” dalam bentuk pemberian penyadaran bahwa target yang hendak diberdayakan mempunyai hak untuk mempunyai “sesuatu”. Misalnya, target adalah kelompok masyarakat miskin. Target tersebut diberikan pemahaman bahwa target dapat menjadi berbeda, dan itu dapat dilakukan jika target mempunyai kapasitas untuk keluar dari kemiskinannya. Progam-progam yang dapat dilakukan pada tahap ini misalnya memberi pengetahuan yang bersifat kognitisi, *belief*, dan *healing* dengan prinsip dasar membuat target mengerti bahwa mereka perlu untuk diberdayakan, dan proses pemberdayaan itu dimulai dari dalam diri mereka (tidak dari orang luar).

2. Tahap Kedua adalah Tahap Pengkapasitasan

Pengakapasitan ini sering kita sebut “*capacity building*” atau dalam bahasa yang lebih sederhana memampukan atau enabling. Selain itu dapat juga diterjemahkan sebagai “membangun kemampuan.” Untuk diberikan daya atau kuasa, yang bersangkutan harus, mampu terlebih dahulu. Misalnya, sebelum memberikan otonomi daerah, seharusnya daerah-daerah yang hendak diotonomkan diberi progam pemampuan untuk membuat mereka “cakap” (*skillfull*) dalam mengelola otonomi yang

diberikan. Proses capacity building terdiri atas tiga jenis, yaitu manusia, organisasi, dan sistem nilai.

Pengkapasitasan manusia dalam arti memampukan manusia, baik dalam konteks individu maupun kelompok. Kita tidak asing dengan konsep ini karena sudah amat sering melakukan *training* (pelatihan), *workshop* (loka latih), seminar, dan sejenisnya di masa “Orba” kita juga sering menggunakan istilah “simulasi” untuk sosialisasi P4. Arti dasarnya adalah memberikan kapasitas kepada individu dan kelompok manusia untuk mampu menerima daya atau kekuasaan yang akan diberikan.

Pengkapasitasan diberikan dalam bentuk restrukturisasi organisasi yang hendak menerima daya atau kapasitas tersebut. Misalnya, sebelum diberikan peluang usaha, bagi kelompok miskin dibuatkan Badan Usaha Milik Rakyat (BUMR). Agar manajemennya efisien, organisasi daerah otonom ditata ulang sehingga berpola *structure follow functions*. Pengkapasitasan organisasi ini sering kali diabaikan, pada maknanya ibarat “menyiapkan medium sebelum meletakkan sediaan.” Sama halnya sebelum kita menanam bibit jagung, kita siapkan pula lahannya. Bukankah kita tidak mungkin menabur bibit jagung sekehendak hati? Menabur bibit jagung diatas karang atau jalan raya tidak akan memberikan tumbuhan jagung, bukan? Perlu diakui, pengkapasitasan kedua ini jarang dilakukan karena kita acap kali *take it for granted* dengan berpikir bahwa “toh kalau manusianya sudah dikapitasikan ia akan melakukan pengkapasitasan organisasi sendiri.” Kadang premis ini berlaku, namun pada praktiknya, sering tidak berlaku.

Pengkapasitasan ketiga adalah sistem nilai. Setelah orang dan wadahnya dikapitasakan, sistem nilainya pun demikian. Sistem nilai adalah “aturan main.” Dalam cakupan organisasi, sistem nilai berkenaan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Sistem dan Prosedur, Peraturan Koperasi, dan sejenisnya. Pada tingkat yang lebih maju, sistem nilai terdiri pula atas budaya organisasi, etika, dan *good governance*.

Pengkapasitasan sistem nilai dilakukan dengan membantu target dan membuat “aturan main” diantara mereka sendiri. Pada program BUMR di Lumajang dan Bengkalis setelah manusianya diberi kapasitas manajerial, diberikan organisasi atau lembaga usaha, kepada mereka juga diberikan “aturan main” agar kalau usahanya menjadi besar kelak, tidak timbul perebutan atau ajang sengketa yang justru merugikan mereka sendiri. Hal yang sama juga berlaku pada otonomi daerah; daerah otonom difasilitasi agar membuat Peraturan Daerah yang mengatur “*rules of the game*” dalam daerah otonom dan pemerintah pusat. Sama halnya dengan pengkapasitasan organisasi, pengkapasitasan sistem nilai jarang dilakukan karena kita mempunyai stereotip bahwa “kalau manusianya dikapitasakan, toh mereka akan membuat aturan main sendiri yang baik.” Pengalaman di lapangan menunjukkan hal lain. Setelah pengkapasitasan manusia, mereka kemudian hanya menjadi individu yang “tercerai berai” dan “tak bersistem nilai tunggal.”

3. Tahap Ketiga adalah Pendayaan

Pemberian daya itu sendiri atau *empowerment* dalam makna sempit. Pada tahap ini, kepada target diberikan daya, kekuasaan, otoritas atau peluang. Pemberian ini sesuai dengan kualitas kecakapan yang telah dimiliki. Tahap ini sangat penting, karena pada saat ini, pembentukan kabupaten-kabupaten baru cenderung dilakukan tidak atas dasar kecakapan memadai, melainkan lebih banyak pada syarat-syarat administratif, misalnya minimal ada tiga kecamatan. Diperkirakan lebih dari 50% kabupaten baru tidak mampu melaksanakan otonomi daerah dengan baik dan benar karena masalah tidak memadainya kecakapan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah. Biaya otonomi daerah dengan demikian menjadi sangat mahal karena pengkapasitasan pasca pemberian otonomi bertemu dengan resistensi dan ketegangan ketegangan yang seharusnya tidak terjadi.

Proses pada tahap ketiga ini cukup sederhana, namun kita sering kali tidak cakap menjalankannya karena mengabaikan bahwa dalam kesederhanaan pun ada ukuran. Pokok gagasannya adalah bahwa proses pemberian daya atau kekuasaan diberikan sesuai dengan kecakapan penerima. Pemberian kredit kepada suatu kelompok miskin yang sudah melalui proses penyadaran dan pengkapasitasan masih perlu disesuaikan dengan kemampuannya mengelola usaha. Jika perputaran usahanya hanya mampu mencapai Rp 5 juta, tidaklah bijaksana jika diberikan pinjaman atau modal sebesar Rp 50 juta.

Pendapat lain mengenai proses pemberdayaan digambarkan oleh Hogan (2000) sebagai suatu siklus yang terdiri dari lima tahapan utama, yaitu :

1. Menghadirkan kembali pengalaman yang memberdayakan dan tidak memberdayakan (*recall depowering/empowering experiences*);
2. Mendiskusikan alasan mengapa terjadi pemberdayaan dan penidakberdayaan (*discuss reasons for depowermen/empowerment*);
3. Mengidentifikasi suatu masalah ataupun proyek (*identify one problem or project*);
4. Mengidentifikasi basis daya yang bermakna untuk melakukan perubahan (*identify useful power bases*); dan
5. Mengembangkan rencana-rencana aksi dan mengimplementasikannya (*develop and implement action plans*).

Pemberdayaan masyarakat tidak bersifat selamanya dengan kata lain pemberdayaan masyarakat berlangsung melalui proses belajar yang dilakukan secara bertahap hingga masyarakat mencapai kemandirian. Menurut Ambar Sulistiyani, Teguh (2004), tahap-tahap yang harus dilalui tersebut meliputi :

- 1) Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.
- 2) Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan-keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan.
- 3) Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan-keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian.

Tahap pertama atau tahap penyadaran dan pembentukan perilaku merupakan tahap persiapan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Pada tahap ini pihak pemberdaya/ aktor/ pelaku pemberdayaan berusaha menciptakan pra kondisi agar dapat memfasilitasi berlangsungnya proses pemberdayaan masyarakat yang efektif.

Tahap kedua atau tahap transformasi kemampuan yaitu proses mentransformasikan pengetahuan dan kecakapan-keterampilan. Proses tersebut dapat berlangsung baik, penuh semangat dan berjalan efektif jika tahap pertama telah terkondisi. Pada tahap ini masyarakat hanya dapat memberikan peran partisipasi pada tingkat yang rendah, yaitu sekedar menjadi pengikut atau objek pembangunan saja, belum pada taraf objek. Peran serta pemerintah sebagai salah satu *stakeholder* pariwisata sangat dibutuhkan pada tahap ini. Pemerintah dan masyarakat sebenarnya memiliki tanggungjawab yang sama dalam pengembangan pariwisata. Namun demikian, pemerintah seharusnya lebih berperan dalam mengajak, menggugah, dan menggairahkan masyarakat. Tugas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat (Saryani, 2013).

Tahap ketiga atau tahap peningkatan intelektual dan kecakapan-keterampilan merupakan tahap yang diperlukan agar masyarakat dapat membentuk kemampuan kemandirian. Kemandirian tersebut akan ditandai oleh kemampuan masyarakat di dalam membentuk inisiatif, melahirkan kreasi dan melakukan inovasi di dalam lingkungannya. Apabila masyarakat telah mencapai tahap ketiga ini maka masyarakat dapat secara mandiri melakukan pembangunan. Dalam konsep pembangunan, masyarakat pada kondisi ini ditempatkan sebagai

subjek pembangunan atau pemeran utama, pemerintah hanya menjadi fasilitator saja.

Menurut Totok, Mardikanto, (2013) bahwa kegiatan pemberdayaan setiap individu dalam suatu organisasi merupakan suatu siklus yang terdiri dari:

- 1) Menumbuhkan keinginan pada diri seseorang untuk berubah dan memperbaiki, yang merupakan titik awal perlunya pemberdayaan.
- 2) Menumbuhkan kemauan dan keberanian untuk melepaskan diri dari kesenangan/ kenikmatan dan atau hambatan-hambatan yang dirasakan.
- 3) Mengembangkan kemauan untuk mengikuti atau mengambil bagian dalam kegiatan pemberdayaan yang memberikan manfaat atau perbaikan keadaan.
- 4) Peningkatan peran atau partisipasi dalam kegiatan pemberdayaan yang telah dirasakan manfaat/ perbaikannya.
- 5) Peningkatan peran dan kesetiaan pada kegiatan pemberdayaan, yang ditujukan berkembangnya motivasi-motivasi untuk melakukan perubahan.
- 6) Peningkatan efektifitas dan efisiensi kegiatan pemberdayaan.
- 7) Peningkatan kompetensi untuk melakukan perubahan melalui kegiatan pemberdayaan baru.

Berdasarkan pendapat para ahli mengenai proses pemberdayaan di atas, peneliti menggunakan teori menurut Wrihatnolo & Dwidjowijoto (2007) dalam mempelajari proses pemberdayaan masyarakat Desa Jambu karena menurut peneliti teori tersebut sesuai dengan fenomena yang ditemukan peneliti di

lapangan, yakni sebelum adanya Desa Wisata Jambu yang didirikan oleh Pemerintah Desa Jambu dan BUMDes Jaya Makmur, mula-mula terjadi proses pemberdayaan. Proses tersebut terjadi dimulai dari tahap penyadaran, pengkapasitasan/membangun kemampuan, dan pendayaan yang dilakukan oleh pengelola kelompok dan dibantu beberapa instansi pemerintah sebagai stake holder.

Dimensi-dimensi ukuran pemberdayaan dikemukakan oleh Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007), menurut mereka pemberdayaan masyarakat harus dilihat baik dengan pendekatan komprehensif rasional maupun inkremental. Pada pengertian pertama, dalam upaya ini diperlukan perencanaan berjangka, serta pengerahan sumber daya yang tersedia dan pengembangan potensi yang ada secara nasional, yang mencakup seluruh masyarakat. Dalam upaya ini perlu dilibatkan semua lapisan masyarakat, baik pemerintah maupun dunia usaha, lembaga sosial, dan kemasyarakatan, serta tokoh-tokoh dan individu-individu yang mempunyai kemampuan untuk membantu. Dengan demikian, programnya harus bersifat nasional, dengan curahan sumber daya yang cukup besar untuk menghasilkan dampak yang berarti.

Pendekatan kedua, perubahan yang diharapkan tidak selalu harus terjadi secara cepat dan bersamaan dalam derap yang sama. Kemajuan dapat dicapai secara bertahap, langkah demi langkah, mungkin kemajuan-kemajuan kecil, juga tidak selalu merata. Percepatan pada satu sektor dengan sektor lainnya bisa berbeda, demikian pula antara satu wilayah dan wilayah lain, atau suatu kondisi dengan kondisi lainnya. Dalam pendekatan ini, desentralisasi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan amatlah penting. Tingkat pengambilan keputusan

haruslah didekatkan sedekat mungkin kepada masyarakat. Untuk mengetahui seberapa jauh pemberdayaan masyarakat berhasil, perlu ada pemantauan dan penetapan sasaran sejauh mungkin yang dapat diukur untuk dibandingkan. Ringkasnya, pemberdayaan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat hingga pada level rumah tangga bahkan individu. Oleh karena itu, untuk mengukur pemberdayaan, kita dapat melihat ukuran pemberdayaan dari segi pengukuran kemiskinan.

Pemberdayaan berdasarkan deskripsi aspek teoretis, dapat di-breakdown ke dalam dimensi dan indikator yang dapat digunakan untuk mengukur proses pemberdayaan masyarakat. Dimensi dan indikator proses pemberdayaan masyarakat yang dimaksud adalah (1) Dimensi masyarakat sebagai subjek pembangunan, dengan indikator (a) partisipatif, (b) desentralisasi, (c) demokrasi, (d) transparansi, (e) akuntabilitas; (2) Dimensi penguatan kelembagaan masyarakat, dengan indikator (a) pembentukan dan penguatan kelembagaan, (b) pelatihan bagi pengelola dan masyarakat, (c) desentralisasi kepada lembaga masyarakat, (d) partisipasi lembaga masyarakat; (3) Dimensi kapasitas dan dukungan aparat pemerintah, dengan indikator (a) kapasitas aparat dalam memfasilitasi, (b) kapasitas aparat dalam mendukung dan melakukan pendampingan; dan (4) Dimensi upaya penanggulangan kemiskinan, dengan indikator (a) pemetaan kemiskinan, (b) kesesuaian usulan dengan kebutuhan, (c) coverage program, (d) ketepatan pemberian dana dan kemampuan pengelolaan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM).

2.2.3 Pengertian Desa Wisata

Menurut Chafid Fandeli, (2002) desa wisata adalah suatu wilayah pedesaan yang menawarkan seluruh suasana yang mencerminkan keaslian desa, baik dari segi kehidupan sosial budaya wilayah pedesaan yang menawarkan seluruh suasana yang mencerminkan keaslian desa, baik dari segi kehidupan sosial budaya, adat istiadat, aktivitas keseharian, arsitektur bangunan, dan struktur tata ruang desa, serta potensi yang mampu dikembangkan sebagai daya tarik wisata, misalnya: atraksi, makanan dan minuman, cinderamata, penginapan, dan kebutuhan wisata lainnya.

Desa wisata merupakan pengembangan dari suatu desa yang memiliki potensi wisata dan dilengkapi fasilitas pendukung seperti alat transportasi atau penginapan. Selain itu, alam dan lingkungan pedesaan yang masih asli dan terjaga merupakan salah satu faktor penting dari kawasan desa wisata. Melalui desa wisata, berbagai aktivitas keseharian masyarakat menjadi daya tarik bagi pengunjung, sehingga desa wisata tidak mengubah wajah desa, tetapi justru memperkuat kekhasan yang dimiliki oleh setiap desa. Baik kekhasan budaya maupun alamnya.

Pengertian desa wisata menurut Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sleman, (2007) adalah pengembangan suatu wilayah desa yang pada hakikatnya tidak merubah apa yang sudah ada tetapi lebih cenderung kepada penggalian potensi desa dengan memanfaatkan unsur-unsur yang ada dalam desa (mewakili dan dioperasikan oleh penduduk desa) yang berfungsi sebagai atribut produk wisata dalam skala kecil menjadi rangkaian aktivitas pariwisata, serta mampu

menyediakan dan memenuhi serangkaian kebutuhan perjalanan wisata baik aspek daya tarik maupun sebagai fasilitas pendukungnya.

Desa wisata adalah suatu bentuk lingkungan pemukiman dengan fasilitas yang sesuai dengan tuntutan wisatawan dalam menikmati atau mengenal dan menghayati atau mempelajari kekhasan desa dengan segala daya tariknya dan dengan tuntutan kegiatan masyarakatnya (kegiatan hunian, interaksi sosial, kegiatan adat istiadat setempat dan sebagainya) sehingga diharapkan dapat terwujud suatu lingkungan yang harmonis yaitu rekreatif dan terpadu dengan lingkungannya (Ratna Sari, 2010).

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa desa wisata adalah suatu objek wisata yang mempunyai potensi seni dan budaya unggulan disuatu wilayah pedesaan yang didukung oleh fasilitas seperti transportasi dan penginapan yang berada dalam struktur kehidupan masyarakat.

2.2.4 Pengertian Pengelolaan Desa Wisata

Definisi pengelolaan oleh para ahli terdapat perbedaan-perbedaan hal ini disebabkan karena para ahli meninjau dari sudut yang berbeda-beda. Ada yang meninjau pengelolaan dari segi fungsi, benda, kelembagaan dan yang meninjau pengelolaan sebagai satu kesatuan. Namun jika dipelajari pada prinsipnya definisi-definisi tersebut mengandung pengertian dan tujuan yang berbeda-beda.

Secara umum pengelolaan tidak jauh dengan manajemen, dikarenakan pada pengelolaan berhubungan langsung dengan kegiatan yang mengatur banyak orang guna mencapai tujuan tertentu. Sama dengan manajemen yaitu seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.

Menurut Manullang (2005) pengertian manajemen tidak jauh berbeda dengan arti manajemen menurut bahasa Perancis kuno yaitu *management* yang artinya seni melaksanakan dan mengatur, dengan kata lain manajemen itu sudah sejak lama dan telah digunakan sebagai sarana pengelolaan sumber daya di dunia. Maka manajemen adalah suatu ilmu yang digunakan untuk mengatur segala aspek atau kekayaan yang ada di dunia dengan melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan tertentu.

Dalam proses manajemen terlibat fungsi-fungsi pokok yang ditampilkan oleh seorang manajer atau pimpinan, yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pemimpin (*leading*), dan pengawasan (*controlling*). Oleh karena itu, manajemen diartikan sebagai proses merencanakan, mengorganisir, memimpin, dan mengendalikan upaya organisasi dengan segala aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien (Nanang Fatah, 2004).

Berdasarkan definisi manajemen di atas secara garis besar tahap-tahap dalam melakukan manajemen meliputi melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan merupakan proses dasar dari suatu kegiatan pengelolaan dan merupakan syarat mutlak dalam suatu kegiatan pengelolaan. Kemudian pengorganisasian berkaitan dengan pelaksanaan perencanaan yang telah ditetapkan. Sementara itu pengarahan diperlukan agar menghasilkan sesuatu yang diharapkan dan pengawasan yang dekat. Dengan evaluasi, dapat menjadi proses monitoring aktivitas untuk menentukan apakah

individu atau kelompok memperoleh dan mempergunakan sumber-sumbernya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan.

Menurut Anwar, (2007) menyatakan bahwa manajemen sebagai sebuah proses yang khas, dilakukan untuk menentukan dan mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber lain.

Pengertian desa wisata menurut Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sleman, (2007) adalah pengembangan suatu wilayah desa yang pada hakikatnya tidak merubah apa yang sudah ada tetapi lebih cenderung kepada penggalian potensi desa dengan memanfaatkan unsur-unsur yang ada dalam desa (mewakili dan dioperasikan oleh penduduk desa) yang berfungsi sebagai atribut produk wisata dalam skala kecil menjadi rangkaian aktivitas pariwisata, serta mampu menyediakan dan memenuhi serangkaian kebutuhan perjalanan wisata baik aspek daya tarik maupun sebagai fasilitas pendukungnya.

Definisi desa wisata menurut Sari, Ratna, (2010) adalah suatu bentuk lingkungan pemukiman dengan fasilitas yang sesuai dengan tuntutan wisatawan dalam menikmati atau mengenal dan menghayati atau mempelajari kekhasan desa dengan segala daya tariknya dan dengan tuntutan kegiatan masyarakatnya (kegiatan hunian, interaksi sosial, kegiatan adat istiadat setempat dan sebagainya) sehingga diharapkan dapat terwujud suatu lingkungan yang harmonis yaitu rekreatif dan terpadu dengan lingkungannya.

Desa wisata merupakan pengembangan dari suatu desa yang memiliki potensi wisata dan dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti alat transportasi atau penginapan. Selain itu, alam dan lingkungan pedesaan yang masih asli

terjaga menjadi salah satu faktor penting dari kawasan desa wisata. Melalui desa wisata, berbagai aktifitas keseharian masyarakat menjadi daya tarik bagi pengunjung, sehingga desa wisata tidak mengubah wajah desa, tetapi justru memperkuat kekhasan yang dimiliki oleh setiap desa, baik ke khasan budaya maupun alamnya.

Berdasarkan pengertian pengelolaan dan desa wisata yang dipaparkan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa pengertian pengelolaan desa wisata adalah serangkaian usaha atau kegiatan yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan program kerja yang melibatkan partisipasi aktif masyarakatnya yang didukung oleh fasilitas akomodasi untuk mencapai tujuan mengembangkan potensi sosial, ekonomi dan budaya suatu daerah.

Berdasarkan fungsi pengelolaan (manajemen) dapat diketahui tahap-tahap dalam melakukan manajemen meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Fungsi-fungsi manajemen tersebut bersifat universal; dimana saja dan dalam organisasi apa saja tergantung pada tipe organisasi, budaya organisasi dan anggotanya.

Pendapat Terry (The Liang Gie, 2000) menyatakan bahwa kegiatan atau fungsi manajemen meliputi: perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*).

1. Perencanaan (*Planning*)

Menurut Sutarno N.S (2004), perencanaan diartikan sebagai perhitungan dan penentuan tentang apa yang akan dijalankan dalam rangka

mencapai tujuan tertentu, dimana menyangkut tempat, oleh siapa pelaku itu atau pelaksanaan dan bagaimana cara untuk mencapai itu.

Menurut Anwar (2007) mengajukan fungsi perencanaan meliputi delapan poin yaitu:

1. Analisis sistem menyeluruh.
2. Analisis tugas atau pekerjaan.
3. Menentukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diharapkan.
4. Menentukan kemampuan populasi target.
5. Mengidentifikasi kebutuhan latihan.
6. Merumuskan tujuan belajar.
7. Uji coba dan menilai ukuran patokan.
8. Mengembangkan kriteria ukuran penguasaan tugas.

Dengan demikian kunci keberhasilan dalam suatu pengelolaan atau manajemen tergantung atau terletak pada perencanaannya. Perencanaan merupakan suatu proses dan kegiatan pimpinan (manager) yang terus menerus, artinya setiap kali timbul sesuatu yang baru. Perencanaan adalah langkah awal setiap manajemen. Perencanaan merupakan kegiatan yang akan dilakukan di masa depan dalam waktu tertentu untuk mencapai tujuan tertentu pula. Sebuah perencanaan yang baik adalah yang rasional, artinya dapat dilaksanakan menjadi panduan langkah selanjutnya. Oleh karena itu, perencanaan itu sudah mencapai permulaan pekerjaan yang baik dari proses pencapaian tujuan organisasi.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa perencanaan pada hakekatnya adalah proses pemikiran yang sistematis, analisis, dan rasional untuk menentukan apa yang akan dilakukan, bagaimana melakukannya, siapa pelaksananya, dan kapan kegiatan tersebut harus dilakukan.

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Rue dan Byars (2006) berpendapat bahwa *organizing is grouping activities, assigning activities and providing the authority necessary to carry out the activities*. Pengorganisasian merupakan pengelompokan kegiatan-kegiatan penugasan, kegiatan-kegiatan penyediaan keperluan, wewenang untuk melaksanakan kegiatannya.

Dalam suatu organisasi dituntut adanya kerja sama antara dua orang atau lebih untuk mencapai suatu tujuan secara efektif dan efisien. Organisasi merupakan suatu proses untuk merancang struktur formal, pengelompokan dan mengatur serta membagi tugas-tugas atau pekerjaan diantara organisasi dapat tercapai. Untuk mencapai tujuan tersebut maka perlu dipilih orang yang memiliki kemampuan dan kompetensi dalam melaksanakan tugas. Oleh karena itu, perlu memilih dan menentukan orang yang akan dipercaya atau diposisikan dalam posisi tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu diperhatikan dalam hal proses penarikan, penempatan, pemberian latihan dan pengembangan anggota-anggota organisasi.

3. Pengarahan (*Actuating*)

Pengarahan adalah keinginan untuk membuat orang lain mengikuti

keinginannya dengan menggunakan kekuatan pribadi atau kekuasaan jabatan secara efektif dan pada tempatnya demi kepentingan jangka panjang perusahaan. Termasuk didalamnya memberitahukan orang lain apa yang harus dilakukan dengan nada yang bervariasi mulai dari nada tegas sampai meminta bahkan mengancam.

Tujuannya adalah agar tugas-tugas dapat terselesaikan dengan baik. Pengarahan berarti para manajer mengarahkan, memimpin dan mempengaruhi bawahan. Manajer tidak melakukan semua kegiatan sendiri, tetapi menyelesaikan tugas-tugas esensial melalui orang-orang lain. Mereka juga tidak sekedar memberikan perintah, tetapi menciptakan iklim yang dapat membantu para bawahan melakukan pekerjaan secara paling baik.

Fungsi pengarahan adalah suatu fungsi kepemimpinan manajer untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja secara maksimal serta menciptakan lingkungan kerja yang sehat, dinamis, dan lain sebagainya.

4. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan adalah kegiatan membandingkan atau mengukur yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma standar atau rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya (Sutarno NS, 2004: 128).

Pengawasan dilakukan untuk mengetahui:

- a. Apakah semua kegiatan telah dapat berjalan sesuai dengan rencana sebelumnya?
- b. Apakah didalam pelaksanaan terjadi hambatan, kerugian,

penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang, penyimpangan, dan pemborosan?

- c. Untuk mencegah terjadinya kegagalan, kerugian, penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang, penyimpangan, dan pemborosan
- d. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas organisasi.

Tujuan pengawasan adalah:

- a. Menentukan dan menghilangkan sebab-sebab yang menimbulkan kesulitan sebelum kesulitan itu terjadi.
- b. Mengadakan pencegahan dan perbaikan terhadap kesalahan-kesalahan yang terjadi.
- c. Mendapatkan efisiensi dan efektifitas.

Dengan demikian, perencanaan merupakan proses awal dari suatu kegiatan pengelolaan yang keberadaannya sangat diperlukan dalam memberikan arah atau patokan dalam suatu kegiatan, kemudian pengorganisasian berkaitan dengan penyatuan seluruh sumber daya yang ada untuk bersinergi dalam mempersiapkan pelaksanaan kegiatan. Tahap berikutnya pengarahan dan pelaksanaan kegiatan yang selalu berpedoman pada perencanaan yang telah ditetapkan. Tahap terakhir adalah pengawasan yang meliputi kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut, dapat dilakukan perbaikan selama kegiatan berlangsung atau untuk memperbaiki program kegiatan berikutnya sehingga tujuan yang telah direncanakan tercapai dengan baik.

2.2.5 Biaya

Menjalankan suatu usaha membutuhkan biaya yang harus dikeluarkan agar perusahaan mampu terus berkualitas. Biaya sendiri merupakan hal yang sangat penting dan tidak terpisahkan dalam menentukan harga pokok produksi. Dengan biaya, perusahaan juga dapat menentukan laba yang diperoleh perusahaan. Pengertian biaya menurut Mulyadi, (2015: 8) “Biaya adalah pengorbanan sumber ekonomis yang diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi, sedang terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu.” Pengertian biaya menurut Dunia dan Abdullah, (2012: 22) yaitu “Biaya adalah pengeluaran-pengeluaran atau nilai pengorbanan untuk memperoleh barang atau jasa yang berguna untuk masa yang akan datang, atau mempunyai manfaat melebihi satu periode akuntansi”. Sedangkan pengertian biaya menurut Siregar dkk, (2014: 23) yaitu “Cost adalah pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh barang atau jasa yang diharapkan memberikan manfaat sekarang atau masa yang akan datang.”

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa biaya dapat diartikan sebagai nilai pengorbanan untuk memperoleh barang atau jasa yang berguna untuk masa yang akan datang atau mempunyai manfaat melebihi satu periode akuntansi yang diukur dalam satuan uang.

2.2.6 Biaya Produksi

Biaya produksi Menurut Agus Purwaji,dkk. (2016: 15) biaya produksi adalah biaya yang terkait dengan fungsi produksi, yaitu biaya yang timbul dalam pengolahan bahan menjadi produk jadi sampai akhirnya produk tersebut siap untuk dijual. Biaya produksi memiliki tiga elemen, yaitu:

1. Biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik.
Biaya bahan baku adalah biaya dari suatu komponen yang digunakan dalam proses produksi, yang mana pemakaiannya dapat ditelusuri atau diidentifikasi dan merupakan bagian integral dari suatu produk tertentu. Contohnya yaitu kain pada perusahaan garmen, karet pada perusahaan ban, dan bijih besi pada perusahaan baja.
2. Biaya tenaga kerja langsung, Biaya tenaga kerja langsung merupakan biaya atau pengorbanan sumberdaya atas kinerja karyawan bagian produksi yang manfaatnya dapat ditelusuri atau diidentifikasi jejaknya, serta dapat dibebankan secara layak kedalam suatu produk.
3. Biaya overhead pabrik, Biaya overhead pabrik adalah biaya produksi yang tidak dapat ditelusuri atau diidentifikasi secara langsung pada suatu produk.
Biaya tersebut antara lain:
 - a) Biaya bahan penolong adalah biaya dari komponen yang digunakan dalam proses produksi tetapi nilainya relatif kecil dan tidak dapat ditelusuri atau diidentifikasi secara langsung pada suatu produk.
 - b) Biaya tenaga kerja tidak langsung adalah biaya atau pengorbanan sumber daya atas kinerja karyawan bagian produksi yang tidak dapat ditelusuri atau diidentifikasi jejaknya atas produk-produk yang dihasilkan perusahaan.

Menurut Mulyadi, (2015:17), metode penentuan biaya produksi adalah cara memperhitungkan unsur-unsur biaya ke dalam kos produksi. Dalam memperhitungkan unsur-unsur biaya ke dalam kos produksi, terdapat dua pendekatan yaitu metode *full costing* dan *variable costing*.

1. *Full Costing Method*, Metode *full costing* adalah metode penentuan kos produk yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam biaya produksi, yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya *overhead* pabrik, baik yang berperilaku variabel maupun tetap.
2. *Variable Costing Method*, *Variable Costing* merupakan metode penentuan kos produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi yang berperilaku variabel ke dalam kos produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya *overhead pabrik* variabel.

Syarkowi dan Laila (2003) membagi biaya produksi menjadi lima macam yaitu :

1. Biaya tetap adalah biaya yang tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya produk selama satu periode produksi (jangka pendek).
2. Biaya variabel adalah biaya yang dipengaruhi oleh besar kecilnya produk selama suatu periode produksi (jangka pendek).
3. Biaya total adalah merupakan jumlah dari biaya variabel dan biaya tetap.
4. Biaya marginal adalah biaya tambahan yang diperlukan untuk menghasilkan satu satuan produk pada suatu tingkat produksi tertentu.
5. Biaya oportunitas adalah nilai suatu sumber daya jika dimanfaatkan pada kemungkinan terbaik.

Mankiw (2003) mengklasifikasikan biaya produksi menjadi tiga yaitu biaya tetap, biaya variabel, dan biaya eksplisit.

1. Biaya tetap yaitu biaya yang diperuntukkan membiayai faktor-faktor produksi yang bersifat tetap, tidak berubah walaupun produk yang dihasilkan bertambah.

2. Biaya variabel yaitu yang digunakan untuk pengadaan faktor-faktor produksi yang sifatnya berubah-ubah atau bervariasi tergantung pada produk yang diusahakan.
3. Biaya eksplisit yaitu pengeluaran-pengeluaran pihak produsen yang berupa pembayaran dengan uang maupun cek untuk memperoleh faktor-faktor produksi atau bahan penunjang lainnya.

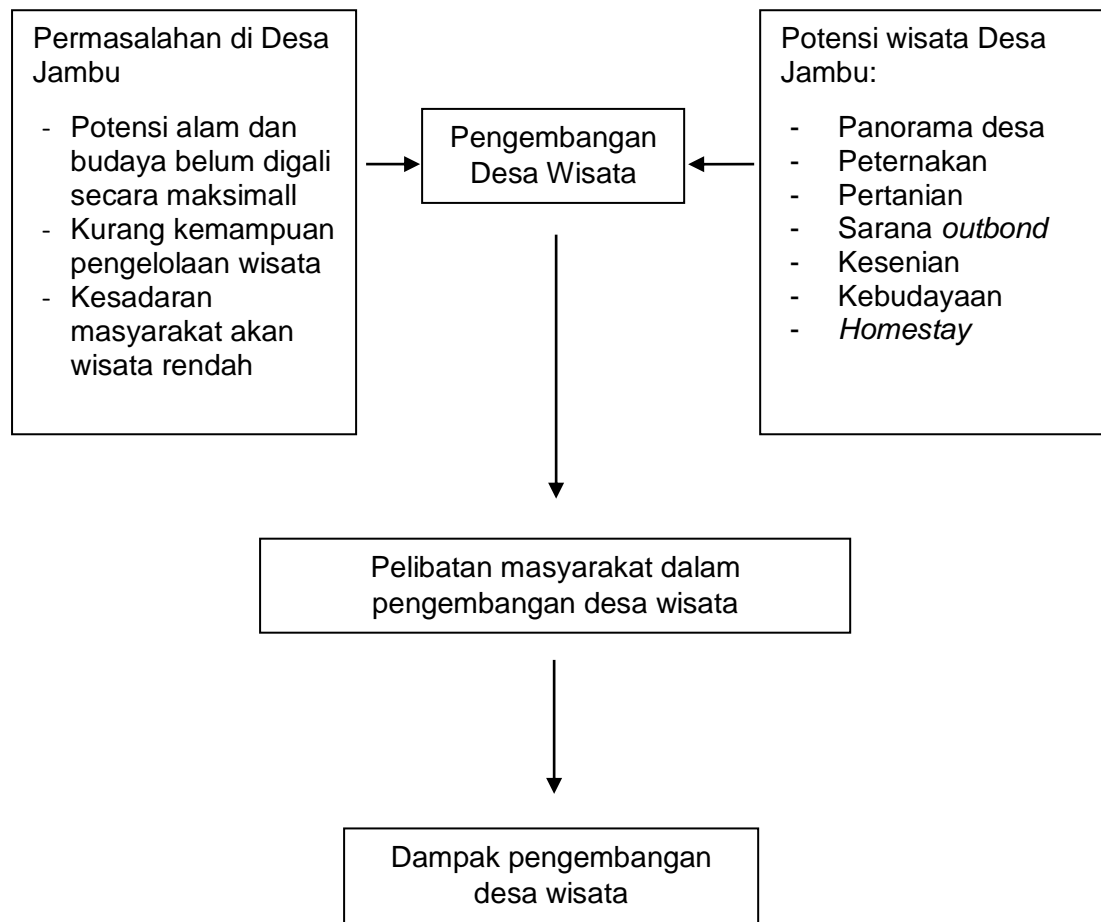
Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa biaya produksi merupakan pengorbanan yang dikeluarkan oleh produsen (petani, nelayan, dan peternak) dalam mengelola usahatannya untuk mendapatkan hasil atau output yang maksimal. Umumnya biaya produksi diklasifikasikan menjadi dua yaitu biaya tetap (*fixed cost*) dan biaya variabel (*variable cost*).

2.3 Kerangka Pemikiran

Pemberdayaan masyarakat adalah proses menciptakan, mengembangkan, dan memperkuat kualitas masyarakat dengan kegiatan yang disesuaikan dengan karakteristik dan potensi masyarakat untuk mencapai kemandirian.

Kondisi Desa Jambu memiliki potensi alam dan budaya yang belum digali secara maksimal. Ditambah dengan rendahnya kesadaran masyarakat akan wisata dan rendahnya kemampuan masyarakat dalam pengelolaan desa wisata menjadi latar belakang dibentuknya Desa Wisata Jambu. Dengan potensi Desa Jambu yaitu panorama desa, pertanian, peternakan, sarana outbond, seni dan budaya, rumah penduduk dapat dijadikan produk wisata Desa Wisata Jambu untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat Desa Jambu. Dengan program-program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pengelola Desa Wisata Jambu

menghasilkan peningkatan keterampilan dan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan Desa Wisata Jambu.



Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran